

RINGKASAN

Kemiskinan adalah permasalahan yang ada di setiap negara termasuk Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menggelontorkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten yang kemudian di transferkan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan anggaran yang diterima desa bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota sekurang-kurangnya yaitu 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.

Terjadinya perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencolok membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan, apakah hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan besaran penerimaan dana desa, alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh setiap desa yang ada. Sehingga dalam penelitian ini, membahas tentang pengaruh dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

Regresi data panel dengan metode *fixed effect model* merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil regresi menggunakan *eviews 9* menunjukkan bahwa variabel dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan variabel alokasi dana desa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

Kata kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHPR, Kemiskinan

SUMMARY

Poverty is a problem that exists in every country, including Indonesia. Government policy in poverty alleviation efforts is carried out by disbursing Village Funds, Village Fund Allocations and Tax and Retribution Revenue Sharing. Village Funds are funds sourced from the APBN which are transferred through the Regency/City APBD and are used to finance the implementation of Village authority based on origin rights, and Village-scale local authority. Village Fund Allocations are part of village finances obtained from Regional Tax Revenue Sharing and Part of the Central and Regional Financial Balancing Funds received by the district which is then transferred to the village to support the implementation of village government.

The striking differences in poverty rates between districts and cities in Central Java Province make this research interesting to do, whether this is influenced by differences in the amount of village fund receipts, allocation of village funds and revenue-sharing taxes and fees received by each existing village. So in this study, discussing the influence of village funds, allocation of village funds and sharing of taxes and fees on poverty in Banjarnegara Regency.

Panel data regression with the fixed effect model method is the methodology used in this study. The regression results using eviews 9 show that the variables of village funds and profit-sharing taxes and fees have a negative and significant effect on reducing poverty in Banjarnegara Regency. Meanwhile, the village fund allocation variable has no significant positive effect on reducing poverty in Banjarnegara Regency.

Keywords: Village Fund, Village Fund Allocation, BHPR, Poverty.

